

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Bahasa

Pengertian Bahasa

Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya yang memiliki makna atau konsep. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna.

Adapun pengertian bahasa menurut para ahli:

- A Ronald Wardhaugh : bahasa sebagai *A system of arbitrary vocal symbols used for human communication*, definisi tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan bukan tulisan, yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitan antara lambang, bunyi dan makna. Itu yang dimaksud dengan arbitrer, dimana dapat dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi,

bekerjasama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku.¹

- B Ferdinand De Saussure : bahasa merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda. Hal ini karena dengan memakai bahasa maka setiap kelompok yang ada pada masyarakat dapat menjadi dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain.²
- C Syamsuddin : bahasa sebagai alat yang digunakan dalam membentuk perbuatan, pikiran, perasaan, serta keinginan dimana menggunakan alat untuk mempengaruhi dan dipengaruhi.³

2.1.2. Bahasa dan Kekuasaan

Bahasa dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling terkait. Melalui bahasa, bisa diketahui situasi yang sedang terjadi, serta ditentukan siapa yang lebih dominan atau memiliki kekuasaan lebih atas partisipan lainnya. Lebih jauh lagi kita dapat mengidentifikasi siapa yang sedang berbicara, apakah politisi, guru, pengacara, ataukah pedagang. Bahasa mengungkapkan kekuasaan yang dimiliki seseorang, dan sebaliknya, kekuasaan seseorang dimanifestasikan melalui bahasa yang digunakannya.

¹ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, "Bahasa Itu Apa? (Materi Kuliah Sociolinguistik)," article, www.uin-malang.ac.id, diakses 7 September 2020, <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/150201/bahasa-itu-apa-materi-kuliah-sociolinguistik.html>.

² dosenpendidikan, "Pengertian Bahasa Menurut Para Ahli," DosenPendidikan.Com, diakses 7 September 2020, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-bahasa-menurut-para-ahli/>.

³ dosenpendidikan.

Bahasa dan kekuasaan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kekuasaan dalam wacana, dan kekuasaan dibalik wacana. Kekuasaan dalam wacana merupakan sisi dari perjuangan kekuasaan dimana kekuasaan itu dapat berlaku, sedangkan kekuasaan dibalik wacana dipengaruhi perjuangan kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan perintah didalam wacana.⁴

Di Indonesia, kekuasaan dalam komunikasi dapat diketahui dari beberapa fitur gaya bahasa yang bisa diperhatikan seperti interupsi, kalimat perintah, sapaan langsung, dan sebagainya. Dalam percakapan terdapat hal-hal yang bisa kita anggap sebagai penanda kekuasaan, antara lain adanya dominasi perbincangan, mengatur peran partisipan lain, mengevaluasi partisipan lain, dan gelar. Tarsidi (2008) menyebutkan, “Tampaknya sudah dipastikan bahwa terdapat hubungan antara cara berbicara dengan kepribadian. Cara berbicara seseorang mencerminkan kepribadiannya, gaya kognitifnya, dan disposisi kepribadiannya”.

2.2.1. Teori Komunikasi Politik

Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah proses menghubungkan pesan-pesan, sekaligus informasi, agar terjadi saling pengertian. Tujuannya adalah agar tercipta kebaikan bersama, terwujudnya kesetaraan, a keadilan, keharmonisan hubungan, serta kedamaian hidup yang abadi dan sejati.⁵ Karakter komunikator selalu berusaha meraih keberhasilan

⁴ Farida Nur Aini, “ANALISA BAHASA DAN KEKUASAAN,” t.t., 9.

⁵ Efriza dan Jerry Indrawan, *Komunikasi politik: pemahaman secara teoretis dan empiris*, Cetakan pertama (Malang, Jatim: Intrans Publishing, 2018), hal. 2.

semaksimal mungkin dalam penyampaian pesan. Ini berarti pengertian komunikasi bersumber dari gagasan komunikator yang ingin disampaikan kepada pihak penerima dengan segala daya dan usaha, bahkan tipu daya agar pihak penerima mengenal, memahami, dan menerima lewat pesan-pesan yang disampaikan.⁶

Komunikasi juga merupakan gejala yang sering diwarnai dengan berbagai hubungan kekuasaan. Sejak awal sejarah telah berlaku sebuah aturan, "yang menguasai sumber komunikasi dan media komunikasi akan cenderung menjadi pihak yang berjaya dan berkuasa dalam masyarakat." Inti dari komunikasi adalah pesan, informasi, dan wawasan. Siapapun yang memiliki ketiganya, berarti memiliki legitimasi untuk mengarahkan sesamanya karena dianggap lebih tahu. Pengetahuan adalah sumber kekuasaan.⁷

Pengertian Politik

Menurut Peter Merkl: "politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan". Betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi masing-masing zaman yang bersangkutan.⁸

Tetapi pada kenyataannya saat ini, politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Politik tidak hanya berada dilingkungan

⁶ Ibid., hlm. 3.

⁷ Ibid., hlm. 4.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 15.

kekuasaan negara, atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara, tetapi dalam beberapa aspek kehidupan, manusia juga sering melakukan tindakan politik seperti, politik dagang, budaya, sosial, atau aspek kehidupan lainnya. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan.

Menurut Peter Merkl: “Politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri”.⁹ Kesimpulan nya, politik dapat dinilai negatif jika kenyataan nya dalam banyak kegiatan terjadi hal buruk dengan kepentingan untuk merebutkan kuasa, takhta, dan harta.

Definisi Komunikasi Politik

Beberapa definisi komunikasi politik menurut para ahli:¹⁰

1. Maswadi Rauf : Komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.
2. Menurut Astrid S. Soesanto, komunikasi politik ialah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat

⁹ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal. 16.

¹⁰ Harun, Rochajat dan Sumarno, A.P. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar* (Bandung, Jawa Barat: CV Mandar, 2006).

semua masyarakatnya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

2.2.2. Unsur Komunikasi Politik

Beberapa ahli juga menjelaskan beberapa unsur-unsur komunikasi politik melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Cangara dalam bukunya menyebutkan unsur komunikasi politik meliputi komunikator, pesan politik, media atau saluran, penerima pesan politik, dan efek atau pengaruh.¹¹

Berbeda dengan Cangara, Sumarno membagi unsur-unsur komunikasi politik kedalam dua bagian, yaitu unsur-unsur pada suprastruktur dan unsur-unsur pada infrasktruktur politik.¹²

2.3.1. Teori Kekuasaan

Pengertian Kekuasaan

Ketika seseorang ingin memperoleh tujuan yang diinginkannya dan juga diinginkan oleh orang banyak, maka orang tersebut harus memiliki kekuasaan yang besar. Faktor pendorong yang menimbulkan keinginan berkuasa antara lain faktor eksplisit dan implisit yang berupa dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Faktor eksplisit dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor implisit dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk berkuasa.

Adapun pengertian kekuasaan menurut para ahli antara lain :

¹¹ Cangara, H. *Komunikasi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

¹² Sumarno. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik* (Bandung, Jawa barat: PT Citra Ditya Bakti, 1989).

a. Walter Nord

Kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

b. Miriam Budiardjo

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku.¹³

c. Max Weber

Kekuasaan itu dapat diartikan sebagai kemungkinan yang membuat seorang aktor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan.¹⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan.

- Teori Kekuasaan menurut Marx Weber

Kekuasaan harus dilihat dari esensi nya masing masing. Kekuasaan ekonomi belum tentu identik dengan kekuasaan yang lain. Orang mencari kekuasaan belum tentu ingin menjadi kaya raya. Orang mencari kekuasaan karena pertimbangan kehormatan. Kekuasaan dan kehormatan memerlukan jaminan dari adanya

¹³ Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, hal. 18.

¹⁴ Budiardjo, hal. 60.

keterlibatan berdasarkan hukum. Tertib hukum merupakan faktor tambahan penting untuk memperluas kekuasaan dan kehormatan meskipun tidak selamanya menjamin. Weber menyatakan bahwa didalam kekuasaan terdapat kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, walaupun orang tersebut melakukan penolakan. Adanya kesempatan untuk merealisasikan kehendaknya pada orang lain dalam bentuk pemaksaan tanpa memperdulikan apapun yang menjadi dasar.¹⁵ Dengan kata lain, kekuasaan menurut Weber adalah kesempatan menguasai orang lain.

Kemudian, Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang dalam kehidupan manusia yang menyangkut dengan kekuasaan. Menurut Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Sedangkan kekuasaan dikonsepsikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkan dengan penerimaan sosialnya dengan formal.¹⁶ Dengan kata lain, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan sikap orang lain sesuai dengan keinginan si pemilik kekuasaan. Weber membagi wewenang kedalam tiga tipe, yaitu :

- 1) Rational-legal authority, yakni bentuk wewenang yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang ini dibangun atas legitimasi

¹⁵ SF Marbun, "PEMERINTAHAN BERDASARKAN KERUASAAN DAN OTORITAS," *Jurnal Portal Universitas Islam Indonesia* vol.3, no. 6 (t.t): hal. 3, <http://jurnal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4938/4374>

¹⁶ Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, hal. 64.

yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya. Wewenang ini dimiliki oleh organisasi-organisasi, terutama yang bersifat politis.

- 2) Traditional authority, yakni jenis wewenang yang berkembang dalam kehidupan tradisional. Wewenang ini diambil legitimasinya berdasar atas tradisi yang dianggap suci. Jenis wewenang ini dapat dibagi dalam dua tipe, yakni patriarkhalisme dan patrimonialisme. Patriarkhalisme adalah suatu jenis wewenang dimana kekuasaan didasarkan atas senioritas. Mereka yang lebih tua atau senior dianggap secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan patrimonialisme adalah jenis wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang-orang terdekat yang mempunyai loyalitas pribadi terhadapnya. Ciri khas dari kedua jenis wewenang ini adalah adanya sistem norma yang dianggap keramat yang tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Charismatic authority, yakni wewenang yang dimiliki seseorang karena kualitas yang luar biasa dari dirinya. Dalam hal ini, kharismatik harus dipahami sebagai kualitas yang luar biasa, tanpa memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh ataukah hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Dengan demikian, wewenang kharismatik adalah penguasaan atas diri orang-orang, baik secara predominan eksternal maupun predominan internal, dimana pihak yang ditaklukkan menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan pada kualitas luar biasa yang dimiliki orang tersebut.

2.4.1. Konsep Ideologi Pancasila

Ideologi bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pemahaman dalam hal ideologi di Indonesia sangat diperlukan, sebab dianggap bisa membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap kemerdekaan. Fungsi ideologi sendiri yaitu membentuk identitas/ciri kelompok atau bangsa. Ideologi mempunyai kecenderungan untuk memisahkan kita dari bangsa lain. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, hal ini dimaksudkan bahwa ideologi pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional. Sebagai suatu ideologi yang terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistik, dijelaskan sebagai berikut :¹⁷

- Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila pancasila.
- Dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

¹⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi Kesepuluh (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hal. 116.

- Dimensi realistik, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan UUD memuat isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara Negara termasuk juga pengurus partai dan golongan fungsional untuk menjaga budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

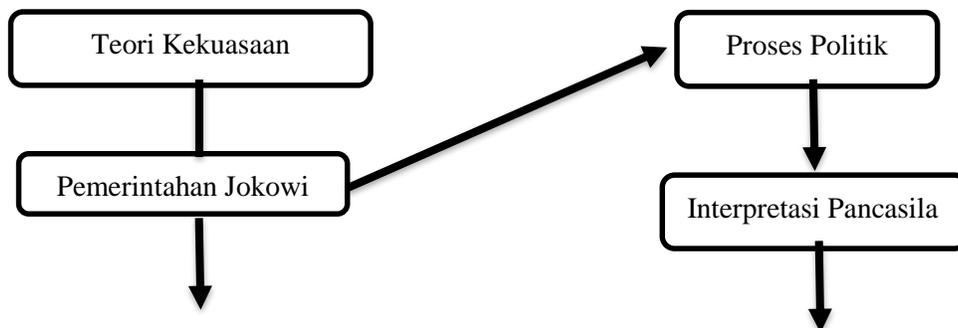
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian
Zahri Nasution, 2007	Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Politik Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan	Jurnal	Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan.
Perbedaan	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, yaitu lebih kekuasaan lembaga eksekutif nya. Penelitian dalam jurnal ini		

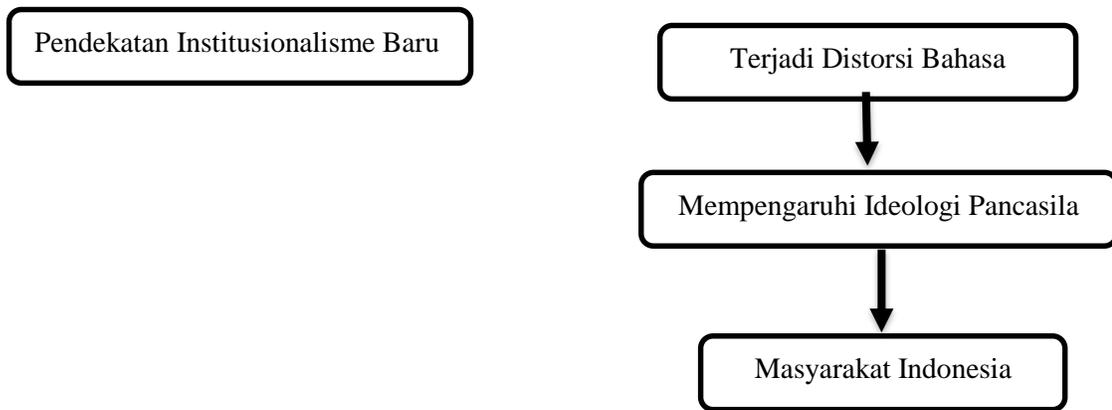
	memiliki persamaan teori yaitu kekuasaan dan juga mengkaji komunikasi politik mengenai distorsi bahasa.		
Andi Azikin, 2018	Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Jurnal	ketika pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme liberal dengan melegalkan penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam milik rakyat diberikan kepada kapitalisme asing, maka pemerintah yang berperan dalam merumuskan kebijakan pemerintahan justru bertentangan dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila kelima Pancasila.
Perbedaan	Objek yang diteliti mengenai kebijakan pemerintahan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu interpretasi Pancasila dalam praktik politik pemerintahan di Indonesia.		
Andrew Sandy dan Sandra Dewi, Universitas Lancang Kuning	Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Baru, Orde Lama, dan Era Reformasi	Jurnal	Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada Era Reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung

			liberalis karena pengaruh globalisasi.
Perbedaan	Perbedaan dari jurnal ini membahas perkembangan Ideologi Pancasila dari masa ke masa. Persamaan penelitian terletak pada interpretasi Pancasila dari pemerintahan di Indonesia.		
Dr. Mhd Halkis	Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeunetika	Buku	Fenomenologi husserl/hermeunetika melihat peristiwa sosial sampai pada hakikat terkait dengan teks dan konteks Pancasila sebagai dasar negara dan interaksi ideologi dalam membicarakan nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan persepsi-persepsi, nilai-nilai moral, norma hukum, dan lain-lain untuk mengatur hidup bersama.
Perbedaan	Terletak pada teori yang digunakan pada buku ini yaitu fenomenologi hermeunetika/husserl. Persamaan penelitian membahas mengenai ideologi Pancasila dalam praktik politik.		

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran





Dalam praktik proses komunikasi politik sering mengalami distorsi bahasa. Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Dalam berbagai kesempatan, komunikasi penguasa selalu akan menggunakan bahasa yang terdistorsi dalam mengemukakan suatu ide, pikiran ataupun konsep terhadap khalayak. Distorsi Bahasa yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap ideologi pancasila masyarakat Indonesia. Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan disetiap kementrian, lembaga, hingga negara untuk memegang teguh ideologi pancasila. Jokowi mengajak semua pihak menampakkan rasa ideologi Pancasila dalam produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, hingga produk-produk perundangan.

Tetapi dalam pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo, pertentangan kebijakan pemerintahannya yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila menimbulkan suatu permasalahan. Salah satunya ialah terbitnya penghapusan Izin Mendirikan Bangunan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh kementrian Agraria dan Tata Ruang

Republik Indonesia. Berbanding terbalik dengan argumentasi pemerintah yang dinilai juga tidak menerapkan pancasila dalam mengelola negara.